

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Kegiatan *participatory conservation planning* (PCP) yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari lima tahap dan dihadiri oleh 18 partisipan, sehingga masih belum memenuhi jumlah optimal partisipan. Ketidakhadiran partisipan lainnya dikarenakan koordinasi terkait pemilihan waktu kegiatan yang masih belum optimal, sehingga kegiatan PCP tidak dapat dihadiri oleh semua undangan. Dalam penelitian ini, kegiatan identifikasi kondisi guna lahan terkait persentase penutupan lahan oleh tanaman tahunan dan penggambaran grafik kondisi guna lahan dilakukan secara partisipatif. Berdasarkan hasil kegiatan PCP, didapatkan hasil yang sama antara hasil diskusi dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelum kegiatan PCP. Hal ini memperkuat objektivitas data yang diperoleh.

5.1.1. Karakteristik Fisik, Sosial, Ekonomi dan Kebijakan

Karakteristik fisik wilayah studi terletak pada wilayah dengan dominasi ketinggian lahan antara 1000-1500mdpl (gambar 4.6), kelerengan sangat curam (gambar 4.7), jenis tanah yang peka terhadap erosi (gambar 4.8), dan curah hujan yang rendah (gambar 4.9). Berdasarkan status penguasaan tanah, wilayah studi terletak pada kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. Pada kawasan hutan, terdiri dari hutan produksi sebesar 17,80% , hutan lindung sebesar 70,44% dan hutan konservasi sebesar 10,25% dari luas wilayah studi (gambar 4.15). Kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi pada kondisi eksisting dimanfaatkan oleh pesanggem dalam kegiatan pertanian. Tutupan lahan pada kawasan hutan lindung terdiri dari tanaman pokok berupa pohon pinus, kayu panjang, akasia, suren, rumput gajah, mahoni, cemara angin dan tanaman buah-buahan serta tanaman semusim berupa sayuran, sedangkan pada kawasan hutan produksi memiliki tanaman pokok berupa pinus serta tanaman sayuran dan kopi yang ditanam oleh pesanggem. Pada kawasan diluar kawasan hutan, dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian anorganik yakni tanaman semusim berupa sayuran dan apel, *green house* bunga serta permukiman penduduk. Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan, diketahui sebesar 96,48% wilayah studi memiliki fungsi kawasan berdasarkan kemampuannya sebagai kawasan lindung (gambar 4.26) dan berdasarkan analisis kesesuaian lahan, 16,66% guna lahan eksisting tidak sesuai dengan

kemampuannya (gambar 4.28) serta mayoritas (83,34%) memiliki tegakan yang rendah (gambar 4.30). Secara umum, berdasarkan hasil *participatory conservation planning*, partisipan menilai wilayah studi masuk kategori cukup baik.

Karakteristik sosial lahan pada wilayah studi sebesar 98,49% lahan berstatus tanah kehutanan dan tanah hak milik dengan persentase 1,51% (gambar 4.18). Pada wilayah studi terdapat lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh dan memiliki kepentingan terhadap wilayah studi yakni Pemerintah Desa, Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Perum Perhutani. Pemerintah Desa memiliki kepentingan akan lestariannya kondisi lingkungan namun pemerintah desa masih belum memiliki kontribusi dalam pencapaian kelestarian lingkungan. Gabungan kelompok tani (gapoktan) memiliki kepentingan akan kelestarian lahan pertanian dan peningkatan hasil produktivitas pertanian. Kegiatan utama gapoktan saat ini masih terfokus pada penyediaan keperluan bahan pertanian. Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) merupakan lembaga yang menaungi pesanggem. LMDH memiliki kepentingan akan kelestarian kawasan hutan dan aktivitas ekonomi pesanggem. Wilayah studi terbagi kedalam tiga LMDH. Dua LMDH dinilai memiliki kelemahan internal kelembagaan sehingga berpotensi menghambat kinerja LMDH. Perum Perhutani memiliki kepentingan akan kelestarian hutan serta aktivitas ekonomi pemanenan getah dan kayu pada kawasan hutan produksi. Kinerja Perum Perhutani dalam hal inventarisasi tanaman dan pengawasan masih rendah sehingga belum mampu mengatasi kegiatan pertanian tanaman semusim pada hutan lindung dan kegiatan pembukaan lahan. Kondisi pendidikan dan kesadaran pengolah lahan di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan tidak jauh berbeda. Pengolah lahan memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga memiliki kecenderungan *limited view of this world* (tingkat pemahaman terhadap kegiatan sosialisasi terkait informasi pertanian berkelanjutan masih rendah) dan *lack of deffered gratification* (ketiadaan sifat pengorbanan kenikmatan sekarang demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan). Hal tersebut terlihat dari pemilihan jenis tanaman yang cenderung kepada tanaman semusim seperti sayuran yang ditanam pada kawasan hutan dan pada lahan dengan kemampuan lahan budidaya tahunan. Selain itu terdapat sifat malas menanam tanaman tahunan seperti kopi dikarenakan waktu panen yang lama.

Karakteristik ekonomi pada wilayah studi adalah adanya ketergantungan secara ekonomi dalam pemanfaatan lahan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar

kawasan hutan. Pengolah lahan memiliki tingkat perekonomian yang rendah hal tersebut terlihat dari tingkat pendapatan buruh tani dan penurunan hasil pertanian sebesar 50% - 60% dari kondisi optimal.

Karakteristik kebijakan yang terkait dengan wilayah studi pada lahan pertanian diarahkan kepada pertanian organik. Hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Pada kawasan hutan, terdapat kebijakan yang membuka peluang kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH berupa penanaman dibawah tegakan melalui program Penanaman Hutan Bersama Masyarakat, selain itu terdapat peluang-peluang kegiatan konservasi lahan kritis dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang pertanian, dan pengembangan benih/bibit unggul.

5.1.2. Arahan Konservasi

Arahan konservasi pada lahan kritis terbagi menjadi arahan konservasi secara fisik, dan arahan kegiatan partisipatif yang mendukung konservasi lahan. Secara umum, arahan konservasi secara fisik pada kawasan hutan adalah pengembangan hutan kemasyarakatan. Arahan konservasi secara fisik terdiri dari pengalihfungsian hutan produksi menjadi hutan lindung dengan luas total 61,86ha pada petak 44C, 45E, 39B-1 (0,023ha), 45B-1 (4,5ha), 45F-3 (0,47ha), 43B(1,3ha), 16, 17-1, 30C dan 32A (gambar 4.41). Pada hutan lindung diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan berupa pengkayaan pohon dengan *strip cropping*. Kegiatan PHBM yang dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung adalah penanaman tanaman buah-buahan seperti sukun, nangka dan alpukat. Pada hutan produksi diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan berupa penanaman pohon pinus dan pemanenan kayu dengan pola tebang jalur atau pola tebang catur. Pada hutan produksi dapat dilakukan pemanfaatan hutan dengan penanaman di bawah tegakan berupa komoditas kopi arabika, empon-empon, rumput gajah, palawija oleh pesanggem dalam bentuk kerjasama PHBM. Pada guna lahan permukiman diarahkan untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai kebun dan pembatasan koefisien dasar bangunan 60%, dan pada guna lahan pertanian diarahkan untuk menerapkan pertanian organik dengan memanfaatkan sisa hasil panen sebagai pupuk hijau atau penggunaan pupuk kompos dan penyiangan rumput dengan cara pembabatan serta penerapan agroforestri untuk mengurangi erosi tanah.

Arahan konservasi secara partisipatif didapatkan dari hasil analisa akar masalah dan akar tujuan yakni perbaikan kondisi internal dan peningkatan fungsi lembaga,

peningkatan pengawasan kondisi lahan, peningkatan sumber daya manusia dan kegiatan reboisasi serta penghijauan.

Untuk membantu dalam penerapan arahan konservasi pada lahan kritis, maka mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut

1. Insentif

- a. Membantu pengembangan potensi kegiatan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan pada kawasan hutan lindung oleh Pemerintah kepada LMDH
- b. Kerjasama jangka panjang antara Perum Perhutani-LMDH
- c. Membantu pemasaran hasil pertanian organik oleh gapoktan
- d. Membantu penyediaan bahan pertanian organik oleh gapoktan
- e. Membantu kegiatan promosi terkait kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu potensi desa (tempat meditasi)

2. Disinsentif

- a. Memperbesar bagi hasil yang diterima oleh Perhutani dari LMDH
- b. Kerjasama jangka pendek hingga pencabutan ijin kerjasama antara Perum Perhutani-LMDH
- c. Membatasi penggunaan pupuk anorganik bersubsidi oleh gapoktan
- d. Pengenaan pajak lahan yang lebih tinggi jika terdapat rencana kawasan terbangun oleh Pemerintah kepada masyarakat

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak akademisi, pemerintah, dan lembaga desa yang terkait dengan keberadaan lahan kritis adalah

1. Penekanan penelitian ini pada aplikasi dari partisipasi masyarakat dalam menentukan arahan konservasi lahan kritis, sehingga terdapat beberapa variabel yang ditentukan berdasarkan pendapat dan pengetahuan partisipan terkait dengan wilayah studi, salah satunya adalah kegiatan identifikasi guna lahan. Untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan metode lain salah satunya penginderaan jauh untuk membandingkan hasil identifikasi bersama partisipan.
2. Jumlah partisipan yang hadir dalam kegiatan PCP tidak memenuhi jumlah optimal partisipan. Untuk penelitian serupa, disarankan untuk memperbaiki kordinasi terkait pemilihan waktu kegiatan PCP agar jumlah partisipan dapat optimal.
3. Perlu adanya dukungan nyata dari pemerintah baik pemerintah tingkat desa, maupun tingkat kota dan provinsi terhadap kegiatan konservasi pada lahan kritis.